

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (L K P J)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk membantu pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana maka di Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dasar Hukum penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021;
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019

1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD

Dalam menganalisis faktor internal/eksternal berfokus pada isu-isu baik itu maupun kendala yang di temui dalam penyusunan program renstra nantinya. Adapun alat yang sangat membantu dalam hal ini yaitu melakukan klarifikasi isu strategis menurut analisis SWOT.

Dalam pengukuran kinerja tersebut setiap tahunnya nanti dituangkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Visi adalah Pandangan yang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi ini harus di bawa dan kemana arah tujuannya, Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat di pengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021, yaitu:

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)”

bertitik tolak dari visi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 – 2021 maka di susunlah visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Berikut:

“Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Tanjung Jabung Timur dalam Menghadapi Bencana”

Dari visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dapat di lihat bahwa untuk menunjang pembangunan Kabupaten Tanjung Timur salah satu faktor penunjang adalah Keadaan Keamanan, Ketertiban, Persatuan Bangsa serta keadaan Politik yang mantap sehingga bisa menunjang Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021 yang hendak dicapai adalah **“MERAKYAT” (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)** Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Agrobisnis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi dibidang industry dan kepariwisataan;
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, serta keamanan daerah yang kondusif; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Sedangkan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek;
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Proritas yang di jalankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan prioritas daerah yang telah di tetapkan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.



Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dibidang “Penanggulangan Bencana”, ditetapkan **10 (sepuluh) Program** dan **29 (dua puluh Sembilan) Kegiatan** selama Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penyediaan administrasi perkantoran

b. Outcome/Hasil

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- 7) Penyediaan barang cetak dan pengadaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 12) Penataan file kepegawaian
- 13) Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasaran.

b. Outcome/Hasil

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur dengan berpakaian rapi dan bersih melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya disiplin aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapan

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur dengan melakukan bimbingan teknis.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya disiplin aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapan

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

a. Tujuan Program

Termonitornya setiap kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta semakin meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Outcome

Semakin Meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta terlaksannya termonitornya dan terevaluasinya setiap kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Perencanaan , evaluasi dan pelaporan SKPD



6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menyusun rencana pembangunan daerah khususnya rencana pembangunan yang berada di SKPD, rencana tersebut merupakan turunan dari rencana pembangunan dari Bupati terpilih, sehingga visi dan misi dari Bupati terpilih akan terwujud.

b. Outcome/Hasil

Dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

7) Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat, relawan yang siap terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masyarakat serta sarana apa saja yang harus di persiapkan seandainya sewaktu-waktu bencana akan datang dan juga langkah-langkah yang harus di lakukan masyarakat untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya bencana dan korban bencana dengan cara dilakukan pelatihan terhadap masyarakat dan relawan.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat dan Relawan penanggulangan bencana yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan seandainya bencana alam itu terjadi sehingga bisa meminimalisir terhadap korban baik itu harta atau pun benda.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang siap terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masyarakat serta sarana apa saja yang harus di persiapkan seandainya sewaktu-waktu bencana akan datang dan juga langkah-langkah yang harus di lakukan masyarakat untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya bencana dan korban bencana.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat dan team penanggulangan bencana yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan seandainya bencana alam itu terjadi sehingga bisa meminimalisir terhadap korban baik itu harta atau pun benda.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:



1. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana

9) Program Tanggap Darurat

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat korban bencana pada masa tanggap darurat bencana, sehingga masyarakat korban bencana bisa mendapatkan bantuan sehingga tidak ada korban yang terlantar dengan bencana yang terjadi.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat korban bencana alam dapat tertangani dengan baik dan relawan dan Team Reaksi Cepat dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan adanya biaya untuk kebutuhan dalam pelaksanaan pertolongan terhadap korban bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana
2. Kegiatan Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
3. Latihan Bersama Penanggulangan Bencana
4. Mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana

10) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan rehabilitasi serta Rekonstruksi terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh bencana alam.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat korban bencana mendapatkan bantuan serta terwujudnya perbaikan fasilitas umum pada masyarakat korban bencana alam sehingga bisa memulihkan keadaan yang rusak

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Penilaian Kerusakan, kerugian akibat bencana
2. Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

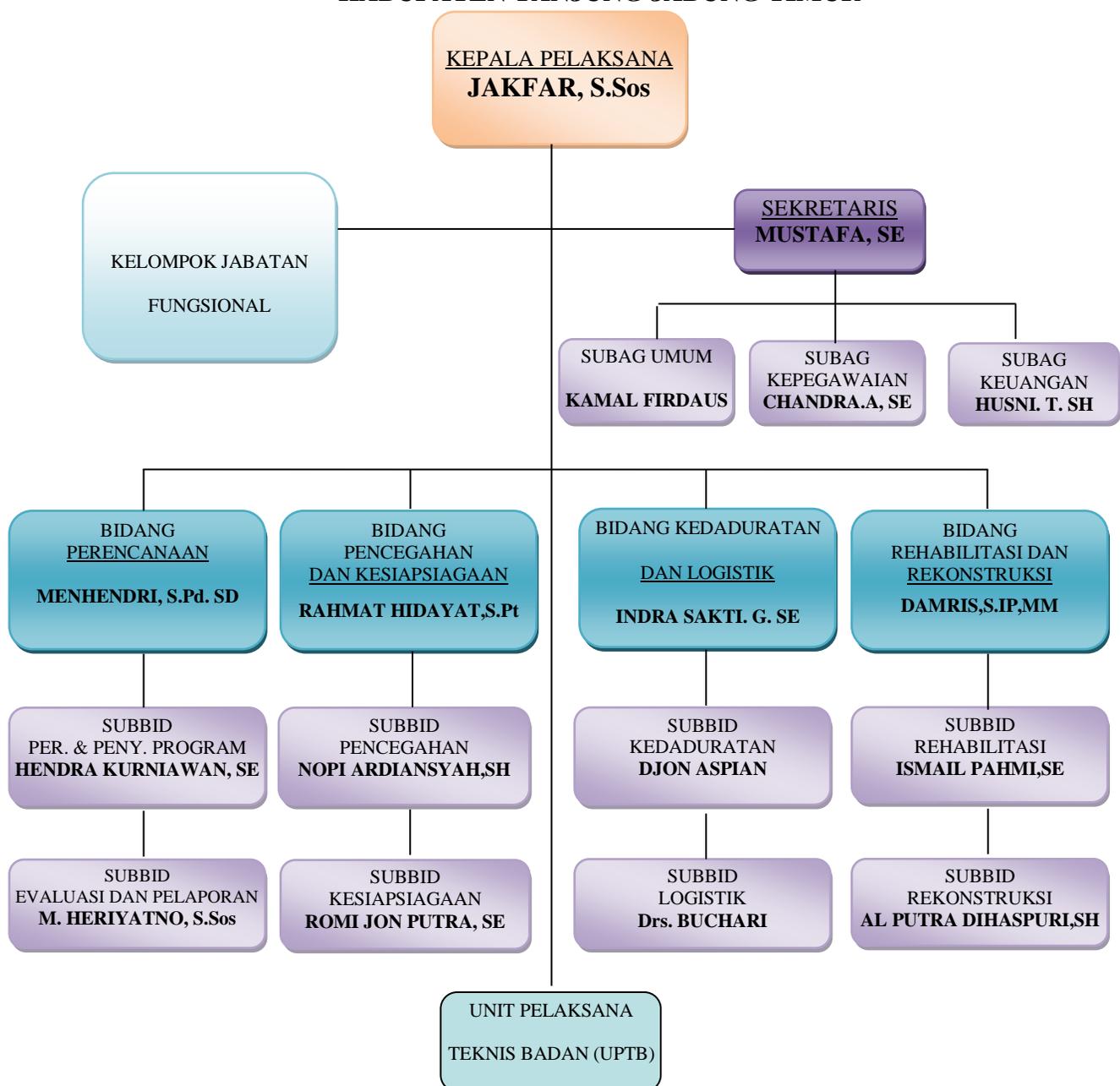
a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Kepala Pelaksana. Dimana Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh kepala pelaksana di bantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut.

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah ;
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan :
 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
 2. Bidang Program terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencegahan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Tanggap Darurat
 - b. Sub Bidang Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



b. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.



Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.

c. Jumlah Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 26 Pegawai Negeri Sipil, 5 Orang PHTT, 27 Orang Team Reaksi Cepat (TRC), Adapun Formasi Pegawai BPBD kondisi saat ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Kepala Pelaksana | : ada |
| b) Sekretaris BPBD | : ada |
| c) Kabid. Perencanaan | : ada |
| d) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan | : ada |
| e) Kabid. Kedaruratan dan Logistik | : ada |
| f) Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi | : ada |
| g) Kasubag Umum | : ada |
| h) Kasubag Kepegawaian | : ada |
| i) Kasubag Keuangan | : ada |
| j) Kasubid Evaluasi dan Pelaporan | : ada |
| k) Kasubid Perencanaan & Peny. Program | : ada |
| l) Kasubid Pencegahan | : ada |
| m) Kasubid Kesiapsiagaan | : ada |
| n) Kasubid Kedaruratan | : ada |
| o) Kasubid Logistik | : ada |
| p) Kasubid Rehabilitasi | : ada |
| q) Kasubid Rekontruksi | : ada |
| r) Staf Pelaksana | : 9 orang; |
| s) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) | : <i>belum terisi</i> ; |
| t) Kelompok Jabatan Fungsional | : <i>belum terisi.</i> |



Tabel I.1
**DATA PEGAWAI BPBD
 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**

<i>NO</i>	<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>JUMLAH PEGAWAI</i>
1.	S.2	1 orang
2.	S.1	17 orang
3.	D-3	- orang
4.	SMA	8 orang
5.	SMP	- orang
6	SD	- orang

Sumber: Sekretariat BPBD Tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 58 (lima puluh empat) pegawai terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural sebanyak 17 (Tujuh belas) orang
- b. Staf Pelaksana sebanyak 9 (Sembilan) orang
- c. PHTT Kantor sebanyak 5 (Lima) orang.
- d. TRC BPBD Kabupaten Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

BAB II PENJABARAN APBD

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan OPD yang tidak mengelolah pendapatan daerah.

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah tahun 2018 yang disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 digunakan untuk mendanai pelaksanaan rutin dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dimana belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, dimana belanja langsung dimaksudkan yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat di ukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Adapun kelompok belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang di tetapkan. Adapaun yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Permasalahan dan Solusi

Setiap tujuan yang hendak dicapai pasti ada masalah yang menghadangnya apakah permasalahan internal maupun eksternal, begitu pula dengan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai service public yang tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana pasti akan ada masalah atau rintangan yang menghadangnya baik masalah internal maupun eksternal.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

a. Pada aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
2. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.
3. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.



- b. Dalam aspek Kelembagaan
 1. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS,
 2. Belum terciptanya sinkronisasi program penanganan kebencanaan antar SKPD terkait.
 3. Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi Tanggap Darurat serta Pasca Bencana.
 4. Belum terciptanya sinkronisasi program kebencanaan antar SKPD terkait.
- c. Dalam aspek Ketugasan:
 1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 2. Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang belum tercipta secara baik.
 3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.
 4. Belum terciptanya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi.
 5. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana dan personil.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau menimalisir masalah antara lain :

- a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang biasa terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penanggulangan bencana
- c. Mengajukan permohonan peralatan dasar dalam penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur.
- d. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) serta relawan penanggulangan bencana sehingga TRC dan relawan ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur
- e. Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAAN DAERAH-DAERAH

3.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang “Penanggulangan Bencana”, ditetapkan **10 (Sepuluh)** Program dan **29 (dua puluh sembilan)** Kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang etakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penataan File Kepegawaian
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:



- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pelatihan relawan penanggulangan bencana

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana
- Pemberdayaan masyarakat dan kesiapan menghadapi bencana
- Fasilitasi dan koordinasi pengurangan resiko bencana

9. Program Tangap Darurat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tangap Darurat Bencana
- Kegiatan Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- Kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Bencana
- Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana
- Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

3.2 Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada urusan pilihan yang dilaksanakan, jadi tidak di bahas dalam point ini.

2.3 Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan

Adapun sasaran yang telah di tetapkan dan menjadi prioritas utama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh;
2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti bimtek relawan dan aparatur penanggulangan bencana (PB);



3. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
4. Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan PB;
5. Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi;
6. Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan;
7. Jumlah aparatur BPBD yang mengikuti sosialisasi undang-undang penanggulangan bencana semakin meningkat;
8. Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur;
9. Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana;
10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Adapun Capaian yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	100	100	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100
		Nilai SAKIP	61	42,43	69,56
6	Program Perencanaan	Persentase tersedianya	100	100	100



No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan			
7	Program Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	7	233,33
8	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	7	233,33
9	Program Tanggap Darurat	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100	100	100
10	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Persentase jumlah KK yang diberikan bantuan terhadap jumlah total KK yang mengalami bencana	100	100	100
Rata-Rata					121,47

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, beberapa hasil yang telah dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Ikut sertanya Pegawai Badan Penanggulangan Bencana dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bintel Keuangan, Kegiatan-Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana baik yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Atau pun BASARNAS Provinsi Jambi;
2. Terbentuknya Satgas Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur sebanyak 27 orang yang siap membantu Pemerintah Daerah ikut membantu dalam Penanganan Penanggulangan Bencana;
3. Ikut berperan aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Tanjung Jabung Timur dalam penanganan penanggulangan bencana dan Bekerja sama dengan SKPD terkait untuk penanganan bencana;
4. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) desa yang menggunakan dana APBD Kab. Tanjung Jabung Timur
5. Melakukan pendataan korban bencana dan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bantuan uang dari Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur untuk para korban bencana;
6. Menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana yang bisa mengancam kita melalui pemasangan Baliho Penanggulangan Bencana (5 Buah) dan pembuatan poster penanggulangan bencana yang sudah di sebarkan di seluruh Kecamatan;
7. Pembentukan Tim Pembina Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Bupati Tanjung Jabung Timur serta Unsur Muspida Kab.Tanjung Jabung Timur;



8. Pembentukan Tim Komando Penanggulangan Bencana yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Umum, serta kepala SKPD terkait dalam penanganan penanggulangan bencana.

2.4 Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan

2.4.1 Kerjasama Antar Daerah

Penanggulangan bencana sangat kompleks, multi dimensional, multi stakeholder, dan multi disiplin ilmu, sehingga penanganannya memerlukan berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penanggulangan bencana juga memerlukan terobosan dan inovasi.

Yang menjadi target dan sasaran kita, apabila terjadi bencana maka dampaknya bisa dikurangi seminimal mungkin. Maka perlu ada upaya yang komprehensif mulai dari mitigasi, membangun kesiapsiagaan, membangun kapasitas, serta memberikan tanggap darurat secara cepat dan tepat, kemudian melaksanakan pemulihan secara cepat.

BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukan koordinasi dengan wilayah-wilayah sekitar/daerah yang langsung berbatasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, bentuk kerjasama baru bersifat komitmen bersama untuk penanggulangan bencana di daerah perbatasan, daerah yang sudah melakukan komitmen untuk melakukan penanggulangan bencana adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

2.4.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Penanggulangan bencana adalah urusan bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha. Semua pihak harus terlibat untuk mengatasi bencana di suatu daerah, sehingga akan menimbulkan sinergi untuk pengentasan bencana. BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur sudah melakukan kerjasama terhadap setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

2.4.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana, pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- Koordinasi dengan Pabung 0419 Tanjab dalam penanggulangan bencana
- Koordinasi dengan Polres Tanjung Jabung Timur dalam penanggulangan bencana
- Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Muara Sabak dalam penegakan hukum untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- Koordinasi dengan Manggala Agni dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ancaman bencana berupa: bencana banjir, kebakaran, gelombang pasang dan bencana angin badai puting beliung, disamping pengaruh potensi bencana kabupaten lain di provinsi Jambi berupa gempa bumi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah ilir Aliran sungai Batang Hari yaitu pertemuan antara Sungai dengan Laut Cina Selatan, sehingga potensi banjir sangat potensial terjadi di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau.

Selain bencana alam banjir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat berpotensi terjadinya bencana kebakaran, yaitu di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Mendahara Ulu. Potensi bencana kebakaran tersebut adalah disebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terbuat dari kayu yang sangat mudah terbakar. Disamping bencana kebakaran pemukiman terdapat potensi kebakaran lahan dan hutan, karena wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 25,39 persen hutan serta kultur tanah gambut yang sangat besar sehingga potensi kebakaran lahan dan hutan kemungkinan sangat besar terjadi.

Potensi rawan bencana gelombang pasang sangat potensial terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu ; Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur. Potensi terjadi bencana gelombang pasang pada wilayah kecamatan tersebut, karena sebagian besar desa-desa bersentuhan langsung dengan laut.

Potensi bencana angin puting beliung sangat potensial terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu ; Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Kuala Jambi. Disamping itu potensi bencana longsor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat berpotensi terjadi di Kecamatan Mendahara Ulu dimana kondisi tanah di wilayah tersebut sebagian



berbukit, dan Kecamatan Berbak sebahagian desa berada dipinggir aliran sungai batanghari dengan kondisi tanah bertebing yang sangat rentan terjadi longsor.

Disamping potensi bencana alam tersebut terdapat potensi bencana non alam yaitu dikhawatirkan pada daerah penambangan minyak dan gas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu di wilayah Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur. Pada wilayah Kecamatan tersebut, merupakan wilayah potensi penambangan minyak dan gas yang dikhawatirkan menjadi potensi bencana.

Bencana sosial selama ini belum pernah terjadi, namun potensi bencana tersebut dikhawatirkan muncul seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal tersebut dapat dipicu terjadi dari permasalahan konflik sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan, disamping itu bencana sosial dapat berpotensi terjadi akibat konflik antar komunitas dimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki penduduk yang bersifat multi etnis.

Dari kondisi letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dilakukan langkah penyusunan program dan kegiatan mengarah kepada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat :



- 1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan.
- 2) Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat, dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- 3) Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.

Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak *gobyakan* setelah terjadi bencana baru bertindak, karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah:

- a. Program pencegahan dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

Sebelum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas implementasinya masih banyak mengalami hambatan dan kekurangan khususnya dari segi pendanaan yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dinilai kemampuan pendanaan pada program penanggulangan bencana sangatlah terbatas, karena penggunaan anggaran lebih terfokus pada pembangunan Sektor Pendidikan dan infrastruktur serta perekonomian rakyat sehingga untuk keperluan pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana dan pembangunan sarana perkantoran sangat minim.



Berkenaan dengan hal-hal diatas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat mengharapkan dan membutuhkan bantuan program dan kegiatan penanggulangan bencana tahun 2019 yang bersumber dana APBN antara lain *Bantuan Peralatan Dasar* dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan *pembangunan Gudang Kantor BPBD* dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Umum Kementerian Dalam negeri RI.

1. Data Bencana

Adapun Data bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur selama tahun 2019 terlampir dalam Laporan ini.



No	Jenis Bencana	TAHUN							
		2018				2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan	No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
1.	Kebakaran Pemukiman	1.	23 Oktober 2018	Ke. Muara Sabak Iilir, Kec. Muara Sabak Timur	2 kk/12 jiwa	1.	17 April 2019	Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur	1 kk/3 jiwa
		2.	24 April 2018	Kelurahan Rantau Indah, Kec. Dendang	1 kk/6 jiwa	2.	23 April 2019	Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur	9 kk/39 jiwa
		3.	1 April 2018	Desa Lagan Ulu, Kec. Dendang	6 kk/19 jiwa	3.	31 Juli 2019	Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak Barat	1 kk/4 jiwa
		4.	18 Februari 2018	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	1 kk/3 jiwa	4.	08 Februari 2019	Kelurahan Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi	3 kk/11 jiwa
		5.	29 September 2018	Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara	1 kk/5 jiwa	5.	28 Desember 2019	Kelurahan Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi	2 kk/6 jiwa
		6.	19 Agustus 2018	Desa Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu	1 kk/2 jiwa	6.	09 November 2019	Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai	1 kk/4 jiwa
		7.	15 November 2018	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	1 kk/3 jiwa	7.	16 Maret 2019	Kelurahan Mendahara Iilir, Kec. Mendahara	2 kk/4 jiwa
		8.	08 April 2018	Desa Tri Mulya kec. Rantau Rasau	1 kk/4 jiwa	8.	08 April 2019	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	3 kk/8 jiwa
		9.	21 Juli 2018	Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu	1 kk/5 jiwa	9.	09 Mei 2019	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	73 kk/214 jiwa
						10.	28 Juli 2019	Kelurahan Mendahara Tengah Kec. Mendahara	15 kk/56 jiwa
						11.	13 Oktober 2019	Kelurahan Mendahara Iilir Kec. Mendahara	2 kk/7 jiwa
						12.	01 April 2019	Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu	1 kk/4 jiwa
						13.	01 April 2019	Kelurahan Rantau Rasau II, Kec. Rantau Rasau	1 kk/5 jiwa



						14.	03 Oktober 2019	Kelurahan Bandar Jaya, Kec. Rantau Rasau	1 kk/5 jiwa
						15.	15 Maret 2019	Kelurahan Sungai Lokan, Kec. Sadu	2 kk/6 jiwa
						16.	03 November 2019	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	1 kk/3 jiwa
						17.	21 Oktober 2019	Desa Sungai Itik, Kec. Sadu	1 kk/1 jiwa
						18.	29 Oktober 2019	Kelurahan Sungai Cemara, Kec. Sadu	2 kk/5 jiwa
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.	14 Agustus 2018	Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur	0,25 ha	1.	20 Maret 2019	Desa Jati Mulyo, Kec. Dendang	0,04 ha
		2.	22 Februari 2018	Kel. Kampung Singkep, Kec. Muara Sabak Barat	2 Ha	2.	10 Juli 2019	Parit 2 Kiri, Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu	3 ha
		3.	03 Juli 2018	Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat	0,0030 Ha	3.	13 Juli 2019	Dusun Kemang RT. 30 Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	¼ ha
		4.	18 Juli 2018	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,0871 Ha	4.	18 Juli 2019	Kelurahan Muara Sbaka Ulu Kec. Muara Sabak Timur	0,2270 ha
		5.	25 Juli 2018	Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	0,4149 Ha	5.	18 Juli 2019	Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu	100 m ²
		6.	26 Juli 2018	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,1306 Ha	6.	20 Juli 2019	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	-
		7.	06 Agustus 2018	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,1382 Ha	7.	28 Juli 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	20,5 ha
		8.	17 Agustus 2018	Kel. Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat	0,2195 Ha	8.	29 Juli 2019	Kelurahan Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi	0,10 ha



	9.	22 Agustus 2018	Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat	3,0000 Ha	9.	30 Juli 2019	Desa Air Hitam Laut, Kec. Sadu	-
	10.	18 Januari 2018	Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	1,2492 Ha	10.	04 Agustus 2019	Desa Merbau, Kec. Mendahara Tengah	1.9473 Ha
	11.	17 Juli 2018	Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	1,6693 Ha	11.	06 Agustus 2019	Desa Suka Maju, Kec. Geragai	8,5 Ha
	12.	28 September 2018	Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	1,000 ha	12.	09 Agustus 2019	Desa Sungai Dusun, Kec. Rantau Rasau	-
	13.	25 juli 2018	Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai	0,1863 Ha	13.	10 Agustus 2019	Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0.6452 ha
	14.	04 Agustus 2018	Desa Suka Maju, Kec. Geragai	1,000 ha	14.	13 Agustus 2019	Desa Sungai Dusun, Kec. Rantau Rasau	-
	15.	12 JULI 2018	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	1,500 Ha			Desa Air Hitam Laut, Kec. Sadu	243,577 ha
	16.	14 Agustus 2018	Desa Sinar Wajo, Kec . Mendahara Ulu	1,5020 Ha			Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu (Kiri)	87,435 ha
	17.	18 Agustus 2018	Ds. Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	15,000 Ha			Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu (Kanan)	256 ha
	18.	19 Agustus 2018	Ds. Simpang Tuan, Kec. Mendahara Ulu	4,000 Ha			Parit Baru Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	146,332 ha
	19.	16 Februari 2018	Ds. Rantau Rasau II, Kec. Rantau Rasau	0,500 Ha			Desa Ramau Baku Tuo Kec. Sadu	556 ha
	20.	21 Juli 2018	Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang	0,2500 Ha	15.	19 Agustus 2019	Kelurahan Simpang, Kec. Berbak	37,3 ha
	21.	14 Agustus 2018	Ds. Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang		16.	21 Agustus 2019	Desa Jati Mulyo Kec. Dendang	221,8 ha
	22.	14 Februari 2018	Ds. Sungai Sayang, Kec. Sadu	6,000 Ha			Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	128,8 ha



23.	23 Juli 2018	Ds. Sungai Sayang, Kec. Sadu	10,000 Ha	17.	24 Agustus 2019	Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu	-
24.	29 Juli 2018	Ds. Remau Baku Tuo, Kec. Sadu	2,6195 Ha			Desa Rano, Kec. Muara Sabak Barat	5 ha
25.	13 Agustus 2018	Ds. Labuan Pering, Kec. Sadu	1,7108 Ha	18.	08 s/d 13 September 2019	Kelurahan Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	124,13 ha
26.	20 Agustus 2018	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	5,000 Ha	19.	16 September 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	444,53 ha
27.	19 Juli 2018	Kel. Simpang, Kec. Berbak	0,5 Ha			Desa Sungai Jeruk, Kec. Nipah Panjang	40 ha
				20.	18 September 2019	Desa Alang-Alang, Kec. Muara Sabak Timur	2 ha
				21.	18 s/d 20 September 2019	Desa Rantau Rasau, Kec. Berbak	262,52 ha
				22.		Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	14,7 ha
						Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	13,9 ha
				23.	19 s/d 24 September 2019	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	52,6 ha
						Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	212,93 ha
				24.	08 s/d 13 September 2019	Kelurahan Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	124,13 ha
				25.	16 September 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	444,53 ha
				26.	16 September 2019	Desa Sungai Jeruk, Kec. Nipah Panjang	40 ha



						27.	18 September 2019	Desa Alang-Alang Kec. Muara Sabak Timur	2 ha
						28.	18 s/d 20 September 2019	Desa Rantau Rasau, Kec. Berbak	562,52 ha
								Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	14,7 ha
								Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	13,9 ha
						29.	19 s/d 24 September 2019	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	52,6 ha
								Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	212,93 ha
3.	Banjir		-	-	-	1.	27 April 2019	Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu	167 kk/645 jiwa
			-	-	-	2.	27 April 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	18 kk/68 jiwa
4.	Abrasi	1.	10 Agustus 2018	Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara	2 kk/8 jiwa		-	-	-
5.	Putting Beliung	1.	18 November 2018	Kel. Nipah Panjang	2 kk/5 jiwa		-	-	-



2. Status Bencana

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 semuanya beskala lokal seperti kebakaran (Rumah maupun Lahan) dan banjir.

3. Pembiayaan dan Anggaran

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2019, baik bencana kebakaran (Rumah maupun Lahan) dan banjir, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA OPD teknis terkait dan pos pembiayaan dana tidak terduga pada PPKD.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Dari Letak kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka dilakukan langkah penyusunan program dan kegiatan mengarah kepada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat :

- 1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan;
- 2) Upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 3) Merubah pendekatan responsive menjadi pendekatan preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana.

Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penanggulagn bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bias diupayakan/direncanakan, tidak gobyakan setelah terjadi bencana baru bertindak, Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka peluang yang bias dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal sebagai berikut :

- 1) Program pencegahan dini bersifat lintas Perangkat Daerah dimana semua Perangkat Daerah diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- 3) Program rehabilitasi dan konstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksanaan yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.



5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan fungsi Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, dan
- f. Dinas Kesehatan

6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan-Peraturan Kepala BNPB (Perka Kepala BNPB) dalam penanggulangan bencana dan kemudian menjadi pegangan daerah dalam penanganan bencana di daerah nya.

3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018

A. Rekomendasi

Pembahasan LKPJ Tahun 2018 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

“ BPBD diminta untuk segera berkoordinasi dengan TAPD terkait dengan penyaluran bantuan bagi korban bencana agar bantuan yang diberikan tidak terlalu lama diterima oleh korban bencana ”.

B. Tindak Lanjut

Telah dilakukan koordinasi bersama TAPD terkait dengan penyaluran bantuan bagi korban bencana melalui tahapan :

1. Mempercepat pembuatan Berita Acara kejadian bencana dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
2. Bantuan bencana diberikan paling lambat 6 bulan pasca bencana

**BAB IV****PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut :

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat.
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan/atau Desa.
3. Kepala Daerah memberitahukan Rencana Kerja dan Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
4. Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/Lembaga.
6. Semua barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada Daerah.
7. Saldo kas dikembalikan ke kas umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut, disamping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Azas Tugas Pembantuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya kepada pemberi tugas. Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

4.1. Tugas Pembantuan yang diterima

Dalam upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Petro China International Jabung Ltd. memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa/kelurahan disekitar wilayah Perusahaan. Desa/Kelurahan ialah pemerintah di tingkat paling bawah, dan masyarakatnya adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana, dan sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Oleh karena itu, penguatan



kapasitas masyarakat di Desa/Kelurahan adalah upaya strategis untuk mewujudkan Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Kegiatan ini langsung dilaksanakan di daerah-daerah yang rawan bencana di seluruh Indonesia, Kab. Tanjung Jabung Timur adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Program Desa Tangguh Bencana.

4.1.1. Satuan Kerja Pelaksana

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB dan saat ini sudah masuk ke dalam Program Prioritas Nasional, mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan dan pengembangan program desa tangguh bencana menuju masyarakat berdaya, Indonesia Tangguh Bencana. Sinergi antar program-program yang sudah ada di desa/kelurahan menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Untuk itu, kerjasama semua pemangku kepentingan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat tangguh bencana.

Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Petro China International Jabung Ltd.

4.1.2. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Petro China International Jabung Ltd. berupa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berupa Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana sebanyak 3 (tiga) desa, yaitu Desa Pematang Rahim, Desa Pandan Makmur dan Desa Pandan Lagan.

Masyarakat tiga desa Mitra dihadapkan pada persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan dan banjir luapan air sungai yang merusak social seluruh Lahan pertanian dan perkebunan serta hutan. Kebakaran Hutan dan Lahan yang juga berakibat pada tingginya angka ISPU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga sangat-sangat mengganggu kesehatan masyarakat salah satu dampaknya sekolah diliburkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan desa tangguh bencana direncanakan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

A. Kegiatan Pengenalan

- 1) Lokakarya / Sosialisasi Pembentukan Destana

B. Kegiatan pilihan meliputi :

- 1) Penyusunan Kajian dan Peta Risiko Bencana
- 2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana

- 3) Pengembangan Sistem Peringatan Dini
- 4) Penyusunan Rencana Evakuasi
- 5) Penyusunan Rencana Kontigensi

B. Pelatihan Relawan

Kegiatan utama dalam rangkaian program pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana ini berada di tingkat desa/kelurahan yang berupa pertemuan formal sebanyak 5 (lima) Kali pertemuan, kegiatan dilaksanakan di Balai Desa di setiap Desa.

Peserta kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tahun 2019 berjumlah 25 orang setiap desa dengan komposisi terdiri dari perangkat pemerintah desa/kelurahan, kelompok pemuda, kader PKK dan kelompok petani. Pertemuan selama 5 (lima) kali pertemuan, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara terus menerus mengingat kondisi social masyarakat memiliki mata pencaharian yang bervariasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana, BPBD Kabupaten/Kota bersama Pokja/Forum PRB di Desa/Kelurahan dapat memilih masing-masing satu kegiatan di kegiatan utama dan kegiatan pilihan.

Kegiatan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Petro China International Jabung Ltd. untuk tahun 2019 dilaksanakan di 3 (tiga) desa yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, desa tersebut ialah sebagai berikut:

- b. Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Dendang (APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
- c. Desa Suka Maju Kecamatan Geragai (APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
- d. Desa Kota Baru Kecamatan Geragai (APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
- e. Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang (APBD Provinsi Jambi)
- f. Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu (CSR Petro China)
- g. Desa Pandan Makmur Kecamatan Mendahara Ulu (CSR Petro China)
- h. Desa Pandan Lagan Kecamatan Mendahara Ulu (CSR Petro China)

4.1.3. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana ini,

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana



2. Belum adanya anggaran untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, sehingga dikhawatirkan kegiatan ini akan vakum setelah dilaksanakan kegiatan pembentukan
3. Masih adanya anggota Destana yang berorientasi terhadap materi, sehingga akan memperlambat jalannya organisasi

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau menimalisir masalah antara lain :

1. Melakukan inventarisasi untuk anggota yang tersedia, berkoordinasi dengan ketua desatan serta kepala desa untuk pengisian anggota yang sudah tidak aktif lagi;
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja sehingga anggaran yang sudah di tetapkan bisa terlaksana dengan baik;
3. Melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan destana masuk dalam anggaran Dana Desa yang berada di desa, sehingga keberlanjutan kegiatan dapat terus berjalan;
4. Menanamkan jiwa relawan terhadap anggota Forum, sehingga jiwa relawan nya dapat muncul bisa menolong diri sendiri dan orang lain dalam penanggulangan bencana.

4.2 Dana Dekonsentrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 tidak mendapat pembiayaan dari Dana Dekonsentrasi dari pusat.

**BAB VI**
PENUTUP

Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan media pertanggung Jawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Walaupun secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mulai terwujud, tidak berarti tidak ada masalah. Permasalahan yang paling mendasar adalah kemampuan Team Reaksi Cepat yang belum terasah, sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional-operasional organisasi serta keterbatasan anggaran belanja SKPD. Hal ini sangat mempengaruhi operasional kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekaligus menyulitkan pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyamakan langkah dan persepsi terhadap program Pemerintah Daerah meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering mengalami kendala/hambatan dan belum maupun mencapai target yang diinginkan.

Mengurangi/meminimalisir permasalahan yang ada perlu dilakukan peningkatan SDM PNS yang ada melalui Diklat-diklat atau kursus sehingga dapat memaksimalkan kinerja, serta melengkapi dengan sarana dan prasaran pendukung operasional kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral.

Kepala Pelaksana
BPBD Kab.Tanjung Jabung Timur

JAKFAR,S.Sos
NIP. 19680612 198810 1 001